

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Nashar dan St Jawiah, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Praktik Strategis*, Yogyakarta, 2025
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet.ke-1, 2010
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ali Kabul Mahi dan Sri Indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasinya*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana, 2014
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016
- Aldwin Rahadian Megantara, *Catatan Kritis Omnibus Law UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Pemerintahan*, Deepublish Publisher, 2021
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016
- Arif Satria, *Politik Sumber Daya Alam*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019
- Ayik Christina Efata, (et. al), *Dekonstruksi Hukum Dalam Pengaturan Alih Fungsi Lahan Untuk Menjamin Kepastian Hukum*, Untag Press, Semarang, 2025
- Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintrah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2016
- Arizona, Yance, *Disharmoni Hukum Tata Ruang dan Hukum Adat*, Epistema Institute, Jakarta, 2021
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah*, dalam: Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

- , *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Dahlia Eka Syahputri Kencana (et.al) *Hukum Pertanahan Problematika Kepastian Hukum Kebijakan Lahan Sawah Di Lindungi Versus Investasi*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2024
- Diva Pitaloka, (et.al), *Pengantar Hukum Tata Ruang*, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat, 2024
- Dian Ekawati Ismail, *Hukum Tata Ruang*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Dina Susiani, *Hukum Tata Ruang*, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Edy Sony dkk, *Pengantar Hukum Progresif*, Tim Gita Lentera, Padang, 2024
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2023
- Firman Freaddy Busroh dan Fatria Khairo, *Varia Teori Hukum Kontemporer*, Intelektual Manifes Media, Bali, 2024
- G. Kertasapoetra dan A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985
- H. M. Arba, *Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- H. Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2016
- H. Sri Jaya Lesmana, *Hukum Adat Indonesia*, Bidara Cendekiallmi Nusantara, Tangerang Banten, 2020
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PersSindo, Yogyakarta, 2010
- Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*, IAIN, Mataram, 2016
- H. R. Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, PT. Alumni, Bandung, 2021

- HuMa, *Tantangan Revisi RTRW dan KKPR untuk Pengakuan Wilayah Adat*, Jakarta, 2022
- , *Implementasi Putusan Pengadilan dalam Konflik Agraria*, Jakarta, HuMa, 2022
- , *Laporan Monitoring Gugatan Masyarakat Adat di PTUN*, Jakarta, HuMa, 2021
- , *Evaluasi Mediasi Konflik Agraria*, Jakarta, HuMa, 2021
- I Gede A.B. Wiranta, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty, 1981
- Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020
- Jabalnur, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi Dan Perlindungan Hukumnya)*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Kartika Dewi Irianto, (et. al), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV. Gita Lentera, Padang, 2024
- Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, *Tentang Kesejahteraan: Seri Perbandingan Sistem Politik*, Nusamedia, Yogyakarta, 2021
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Indonesia*, Penerbit Alumni, Jawa Barat, 2022
- Liza Soraya Kusuma Devi dan Rizki Fadhila Anandika, *Patrol Taru: Kenali Peruntukan Ruang dan Awasi Pemanfaatannya*, Diterbitkan Oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jakarta, 2021
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2008

- Marulak Pardede, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2021
- M. Afaruq Nirwana, (et.al), *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*, Tim Gita Lentera, Sumatera Barat, 2024
- M Arszandi Pratama, (et. al), *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Semua Bisa Paham, Semua Bisa Ikut Serta*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978
- Muhammad Mutawali, *Negara Hukum Kedaulatan Dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023
- M. Nur Akhyar dan Nurmalisa H. Chawari, *Negeri dalam Negeri: Otonomi Khusus dan Tantangan Integritas Nasional*, CV Jejak, Jawa Barat, 2025
- Moore, Christopher, *The Mediation Process* (San Francisco: Jossey-Bass, 2019
- Ni' Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2019
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Kolonial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Novianti Murti Hantoro (et.al), *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016
- Novita Wulandari (et. al), *Meningkatkan Implementasi Kebijakan Publik Melalui Reformasi Perizinan*, Feniks Muda Sejahtera, 2025
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978
- , *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019
- , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019

- Rio Christiawan, *Omnibus Law (Teori dan Penerapannya)* Sinar Grafika, Jakarta 2021
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- R. Widodo D. Pramono dan Ananda Prima Yurista, *Hukum Perencanaan: Perangkat Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Berkeadilan dan Permukiman Berkualitas*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2024
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara Menuju Keadilan Dan Keseimbangan, Ruang Berkarya*, 2024
- Rukka Sombolinggi, *Catatan Kritis atas UU Cipta Kerja dan Hak Adat*, AMAN, 2021
- Safitri, Myrna A., *Evaluasi Implementasi KKPR Pasca-Omnibus Law*, Epistema Institute, Jakarta, 2021
- Sumiaty Adelina Hutabarat, (et.al), *Hukum Adat Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Sjachran Basah, *Sekilas Lintas Perizinan Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan*, Majalah Pajajaran Nomor 012, UNPAD, 1993
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, Cet.ke-1, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- , *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta, 2018
- Sumaatmadja N, “Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keuangan” dalam: Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017
- St. Paul Minn, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing co, disunting Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang*

- Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah*, dalam: Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta, 2017
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2024

B. Jurnal

- Sutaryono, (et.al) “Penguatan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Pengembangan Kota*, Vol 9, No 9. hlm. 1, (2025).
- Eko Budihardjo, “Penataan Ruang dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Perencanaan Wilayah*, Vol. 12 No. 2 (2010).
- Rachman, Noer Fauzi, “Tata Ruang dan Konflik Agraria,” *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 7 No. 1 (2011).
- Sembiring, Melki, “Asimetri Hukum dalam Pengakuan Hak Ulayat,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 3 (2013).
- Arizona, Yance, “Pluralisme Hukum Agraria” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2 (2013).
- Arizona, Yance, “Administrative Law and Indigenous Rights in Spatial Planning,” *Indonesia Law Review*, Vol. 11 No. 3 (2021)
- Arizona, Yance, “Sentralisasi Perizinan dan Hak Adat Pasca Putusan MK,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020).
- Sudjito, “RTRW sebagai Instrumen Pembangunan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 4 (2011).
- Mia Siscawati, “Partisipasi Masyarakat Adat dalam Perizinan,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 15 No. 3 (2013).
- Mia Siscawati, “Indigenous Deliberation and Conflict Resolution,” *Forest and Society Journal*, Vol. 4 No. 2 (2020)

- Siscawati, Mia, "Evidentiary Challenges in Indigenous Rights Litigation," *Forest and Society Journal*, Vol. 5 No. 1 (2021).
- Kurniawan, Andi, "Konflik Agraria dan Perizinan Usaha," *Jurnal Hukum Ius Civile*, Vol. 9 No. 1 (2015).
- Kurniawan, Andi, "Non-Litigation Dispute Resolution in Agrarian Conflicts," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2 (2022).
- Kurniawan, Andi, "Administrative Remedies in Spatial Conflicts," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1 (2022).
- Kurniawan, Andi, "Local Wisdom and Environmental Governance," *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No. 1 (2021).
- Simarmata, Rikardo, "Alternative Dispute Resolution in Land Conflicts," *Indonesia Law Review*, Vol. 9 No. 2 (2019).
- Simarmata, Rikardo, "Regulatory Shifts in Land Use Licensing in Indonesia Post-Omnibus Law," *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, Vol. 6 No. 2 (2022).
- Simarmata, Rikardo, "Administrative Remedies in Indigenous Land Conflicts," *Indonesia Law Review*, Vol. 10 No. 2 (2020).
- Simarmata, Rikardo, "Decentralization and Spatial Planning in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, Vol. 7 No. 1 (2020).
- Griffiths, John, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism*, No. 24 (1986).
- Bedner, Adriaan & Yance Arizona, "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 21 No. 5 (2020).
- Marbun, S.F., "Judicial Control of Administrative Decisions in Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1 (2021).
- Safitri, Myrna A., "Revising Spatial Planning Instruments for Indigenous Peoples' Protection," *Journal of Law and Policy*, Vol. 14 No. 2 (2020).
- Safitri, Myrna A., "Mediation in Agrarian Disputes in Indonesia," *Journal of Law and Policy*, Vol. 15 No. 1 (2020).

- Safitri, Myrna A., "Living Law in Administrative Courts: Indigenous Rights Cases," *Journal of Law and Policy*, Vol. 16 No. 2 (2021).
- Safitri, Myrna A., "Perda Pengakuan Adat sebagai Instrumen Resolusi Konflik Agraria," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019).
- Malino Gemma Galgani, "Peran Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 dalam Penanganan Konflik Sosial: Tinjauan Kepastian Hukum", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Nomor 2 Volume 5, (2025).
- Iksan Lubis Dkk, "Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat", *Tunas Agraria*, Nomor 8 Vol. 2. (2025).

d. Makalah/internet

- Mediana, "Apa Saja Implikasi Putusan MK terhadap Buruh dan Pengusaha?" <https://www.kompas.id/artikel/> (diakses tanggal 10/11/2024, pukul. 10:50)
- Agapitus Batbual dan Sapariah Saturi, "Proyek Tebu Merauke, Ingatkan Risiko Lingkungan dan Pelanggaran HAM" <https://www.mongabay.co.id/> (diakses tanggal 13/11/2024, pukul 03:00)
- Sarjan Lahay, "Jutaan Hektar Jadi Kebun Tebu, Was-was Nasib Orang Papua" <https://www.mongabay.co.id> (diakses tanggal 13/11/2024, pukul 03:07)
- Rofiq Hidayat, 2022. "UU Cipta Kerja Dinilai Menambah Sengkarut Persoalan Tata Ruang" <https://www.hukumonline.com/berita/a/> (diakses tanggal 10/11/2024, pukul 01:09)
- Rukka Sombolinggi, 2020. "Undang-Undang Omnibus Law Merampas Wilayah Adat ditengah Ketidakpastian Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat" . <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2020/10/SIARAN-PERS-Sikap-AMAN-terhadap-UU-Omnibuslaw.pdf> (diakses tanggal 10/11/2024, pukul 01:12)

Richaldo Hariandja, Menanti Aksi Satgas Penetapan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Mongabay, 2025. 2020 (diakses tanggal 20/10/2025 pukul 03.17)

Tempo Publishing, Investigasi – Bom Waktu Tanah Adat Merauke, 2020 (diakses tanggal 20/10/2025 pukul 03.17)

Komnas HAM, Dampak Proyek Strategis Nasional Terhadap Hak Asasi Manusia, 2024 (diakses tanggal 20/10/2025 pukul 03.17)

e. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Tesis/Disertasi

Nuria Siswi Enggarani, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan Lokasi Di Kota Surakarta*, Tesis, di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006

Indar Dewi, 'Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Tata Ruang Di Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja' Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2022

Yusuf 'Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Peraturan Perundang-undangan' Magister ilmu hukum kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, 2012

Ardiansyah 'Perkembangan Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Era Otonomi Daerah' Magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012

Wahyu Arsyantuti 'Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat' Magister ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2009

I Gede Yudi Arsawan, "Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja", *Amsir Law Journal*, Vol 5, No. 1. Hlm. 1, (2023).

Octovianus Lawalata 'Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Investasi Nasional' (Doktor ilmu hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017).

Tumisah ‘Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Di Wilayah Pesisir Yang Berbasis Nilai Keadilan’ (Doktor Ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

Rico Septian Noor ‘Rekonstruksi Kedudukan Lembaga Adat Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah Berbasis Nilai Keadilan’ (Doktor Ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (jo. UU No. 9/2004, jo. UU No. 51/2009).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 67.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Naskah Akademis. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

United Nations, *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), 2007, Pasal 32.